

TANGGUNG RENTENG DALAM KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA

Ira Sumarni*

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

rarasumarni@gmail.com

Faisal Efendi

Sekolah Tinggi Agama Islam Balaiselasa

faisalefendi215@gmail.com

Mardianton

Sekolah Tinggi Agama Islam Balaiselasa

mardianton@stai-bls.ac.id

Muhammad Fauzi

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

mf0093391@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Received:

October 26, 2023

Revision:

December 25, 2023

Published:

December, 31, 2023

Abstract

Tanggung Ranteng is another form of collateral which is realized in the form of mutual cooperation between fellow members who have difficulty paying their loan installments. This study focuses on the economic resilience of KSPP member families, namely looking at where the family lives, family income, funding for children's education, family financial security. Examining how it is implemented and also the implications of Tanggung Renteng for SPP members. The type of research used by the author is Qualitative Research. The methods used are observation, interviews and documentation. The results of the implementation of Tanggung Renteng in KSPP aim to dedicate members so that they are not often in arrears in payments because it affects the sustainability of the group. The group's growth provides security for the future. Among them is a place to live, group members succeeded in repairing (rehabilitating) the house from one that previously had no toilet, plank walls, cement floors, to a better one. On the other hand, members are also able to build a good residence, meaning that the residence has proper walls and facilities,

gradually. Guarantee in members' family income. The education of the children of group members provides certainty from the efforts made by the members. Group members have implemented 12 years of compulsory education for their children and some group members are able to pay for their children's education up to university, as well as providing family financial security. The implications of implementing Tanggung Renteng in women's savings and loan groups provide guarantees for the growth of the SPP group for the future and for the family's economic resilience, including the guarantee of members' residence in family income. Ability to finance children's education. Family financial guarantees from SPP members, then health guarantees for all SPP group members.

Keywords: *Tanggung Renteng, Women's Savings and Loans, Family Economic Security*

Abstrak

Tanggung renteng merupakan salah satu bentuk jaminan yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong antar sesama anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pinjamannya. Penelitian ini fokus pada ketahanan ekonomi keluarga anggota KSPP yaitu melihat tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pendanaan pendidikan anak, keamanan finansial keluarga. Menelaah cara pelaksanaannya dan juga implikasi tanggung jawab bersama bagi anggota SPP. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Kualitatif. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penerapan tanggung jawab bersama di KSPP bertujuan untuk mendedikasikan anggotanya agar tidak sering menunggak pembayaran karena berdampak pada keberlangsungan kelompok. Pertumbuhan grup memberikan keamanan untuk masa depan. Diantaranya adalah tempat tinggal, anggota kelompok berhasil memperbaiki (merehabilitasi) rumah dari yang sebelumnya tidak memiliki toilet, dinding papan, lantai semen, menjadi lebih baik. Di sisi lain, anggota juga mampu membangun tempat tinggal yang baik, artinya tempat tinggal tersebut memiliki tembok dan fasilitas yang baik secara bertahap. Jaminan pendapatan keluarga anggota. Pendidikan anak anggota kelompok memberikan kepastian dari usaha yang dilakukan anggotanya. Anggota kelompok telah menerapkan wajib belajar 12 tahun bagi anak-anaknya dan sebagian anggota kelompok mampu membiayai pendidikan anaknya hingga perguruan tinggi, serta memberikan jaminan keuangan keluarga. Implikasi dari penerapan tanggung jawab bersama pada kelompok simpan pinjam perempuan memberikan jaminan bagi tumbuh kembang kelompok SPP di masa depan dan bagi ketahanan ekonomi keluarga, termasuk jaminan tempat tinggal anggotanya dalam pendapatan keluarga. Kemampuan membiayai pendidikan anak. Jaminan finansial keluarga dari anggota SPP, kemudian jaminan kesehatan seluruh anggota kelompok SPP.

Kata kunci: Tanggung Renteng, Simpan Pinjam Perempuan, Ketahanan Ekonomi Keluarga

1. PENDAHULUAN

Perekonomian yang berbasis pada tenaga manusia, khususnya kegiatan perekonomian, dapat membuka banyak peluang partisipasi masyarakat sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan dan berkembang secara efektif (Hesmawati Fifi, 2018). Pembangunan ekonomi dilakukan “atas nama rakyat”, setiap sistem perekonomian dapat digolongkan sebagai model ekonomi massal (Vesely et al., 2015). Menurut Pasal 33 UUD 1945, perekonomian Indonesia dibentuk sebagai suatu usaha patungan yang didasarkan atas asas kekeluargaan (Mohamad, 2018). Kelompok usaha

tunggal adalah kelompok yang bergerak pada satu sektor saja dalam suatu bidang usaha, yaitu pertambangan, sektor kredit atau manufaktur. Koperasi multisektor adalah organisasi pembangunan yang beroperasi di berbagai bidang seperti pembelian dan penjualan (Swasono Sri-Edi, 2015).

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis kelompok, antara lain kelompok pesantren, kelompok simpan pinjam, dan sekolah (Gonçalves et al., 2021). Seperti halnya Kelompok Perempuan Simpan Pinjam (KSPP), pembentukan kelompok di masyarakat dilakukan untuk menunjang taraf hidup masyarakat (Statistik, 2018). Tujuan dibentuknya kelompok ini tidak lepas dari peningkatan perekonomian masyarakat dengan meningkatkan kesadaran akan organisasi-organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memajukan kesejahteraan hidup masyarakat melalui berbagai kegiatan sehari-hari (Rukmana, 2021)

Kelompok ini menekankan pada upaya peningkatan perekonomian masyarakat setempat (J et al., 2015). Organisasi ini dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk menjadi pusat kegiatan perekonomian daerah, menyalurkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mengawasi kegiatan perekonomian lainnya (Parthasarathy et al., 2014). Banyaknya individu yang tergabung dalam kelompok ini membuktikan keberhasilan kelompok ini dalam memberikan layanan yang diminta masyarakat sehingga meningkatkan kualitas layanan tersebut. Beberapa keinginan masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan perekonomian berkaitan dengan gagasan untuk menggunakan suatu jasa atau bergabung dengan suatu kelompok sehingga menimbulkan permasalahan yang harus diselesaikan oleh suatu kelompok (Unit Pelaksana Kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir)

Penanganan Dana Bergulir Masyarakat oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) (Eka Wahyu, Hellen Monica, 2023). Di setiap kecamatan telah berjalan cukup baik. Dari 15 UPK Dana Bergulir Masyarakat yang ada di Kab. Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dikelola oleh UPK dan jumlah aset yang dikelola pada tahun 2022 sebesar Rp. 49 Miliar lebih yang tersebar di 15 UPK se-Kabupaten Pesisir Selatan (DPM Website of Pesisir Selatan Regency, accessed 22 February 2023).

Melalui program pembangunan, harmonisasi sistem, struktur program dan proses, Program Mandiri Pemberdayaan Masyarakat Nasional (PNPM), yaitu program pengentasan kemiskinan nasional yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, dapat tercapai. Program ini memberikan dukungan finansial dan insentif untuk mendukung inisiatif dan gagasan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengatasi permasalahan guna meningkatkan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan (Materi Grand Strategi Nasional PNPM).

KSPP disini merupakan bagian dari program PNPM yang dilaksanakan oleh unit pengelolaan kegiatan kecamatan (UPK) (Nesadurai, 2012). Diberikan kepada kelompok perempuan di rumah tangga miskin. Tujuan dari program Simpan Pinjam Perempuan adalah memberikan modal agar perempuan dapat melakukan kegiatan yang menghasilkan uang. (entrepreneurship) (Sunarti et al., 2021). Dalam proses peminjamannya, kelompok Simpan Pinjam Perempuan menerapkan pada seluruh kelompok pelaksanaan “Tanggung Renteng”. Implementasi Tanggung Renteng ini adalah

seluruh KSPP yang bergabung mempunyai tanggung jawab yang sama, artinya semua kelompok harus saling membantu jika salah satu kelompok mengalami kesulitan (Stanczyk, 2019).

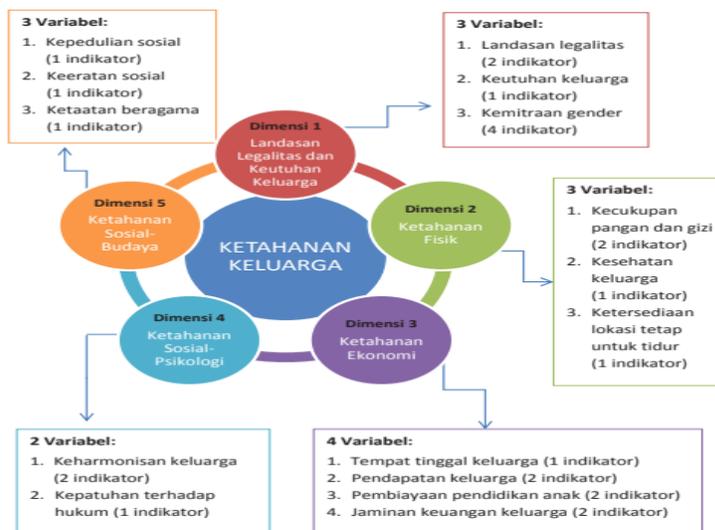
Menurut RS selaku pengurus Kelompok Simpan Pinjam (SPP) Perempuan, Tanggung Renteng ini merupakan salah satu bentuk kepedulian antar sesama kelompok, agar kelompok tersebut tidak mempunyai masalah keuangan, sehingga solusi yang paling tepat adalah Tanggung Renteng, jika kelompok anggota mengalami tunggakan pembayaran maka kelompok lain harus membantu anggota yang mengalami tunggakan, tujuannya untuk menghindari defisit anggaran pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Interview, 2023).

Pada tahun 2017 terdapat 131 kelompok simpan pinjam perempuan di Kecamatan Ranah Pesisir, pada tahun 2018 terdapat 117 KSPP, dan pada tahun 2022 hingga saat ini terdapat 84 kelompok yang tersebar di 10 Nagari di Kecamatan Ranah Pesisir, setiap kelompok harus memiliki 10- 15 anggota per kelompok. Kemudian besarnya pinjaman yang diterima masing-masing kelompok sesuai dengan jumlah proposal yang diajukan ke UPK kecamatan dan kemudian diverifikasi oleh tim verifikasi kecamatan. Usaha yang diusulkan oleh kelompok biasanya digunakan untuk berwirausaha, seperti: Perdagangan, Peternakan, Peternakan, dan Nelayan. Rata-rata jumlah pinjaman yang diterima kelompok secara keseluruhan berkisar antara 100 juta hingga 150 juta, sesuai dengan kebutuhan kelompok dan besarnya pinjaman yang diterima anggota. Untuk anggota jumlah pinjaman yang diterima berbeda-beda, untuk anggota baru bergabung pinjaman yang diterima hanya 2 juta, sedangkan untuk anggota yang sudah lama bergabung (kurang lebih 3 tahun) pinjaman yang diterima maksimal 10 juta (UPK Ranah Pesisir District). Aset yang dimiliki saat ini sekitar tiga miliar (3 miliar) lebih. Secara tahunan, rata-rata surplus simpanan dan pinjaman perempuan adalah sekitar 300 juta (Data Kelompok Simpan Pinjam Perempuan, 2022). Namun pengaruh yang dihasilkan oleh Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) belum diketahui secara eksplisit, masih banyak hal yang belum dapat ditentukan.

Keluarga yang kuat atau tangguh memiliki akses terhadap uang dan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk akses terhadap makanan, air bersih, layanan kesehatan, perumahan, integrasi sosial, dan waktu luang (Frankenberger, 1998). Apabila suatu keluarga memenuhi syarat-syarat berikut, maka keluarga tersebut dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang tinggi: 1) Ketahanan sosial, yang mengedepankan nilai-nilai agama, komunikasi efektif, dan komitmen keluarga yang kuat; 2) ketahanan psikologis, yang meliputi kemampuan menghadapi permasalahan non fisik; dan 3) ketahanan fisik, yang mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (Bloom et al., 2010).

Pembayaran kewajiban anggota secara rutin dan pelaksanaan sistem Tanggung Renteng yang tidak terpenuhinya kewajiban ditanggung bersama oleh seluruh anggota kelompok, maka aset yang dimiliki SPP lebih aman dan terkendali (Skinner et al., 2010). Penerapan sistem Tanggung Renteng juga memperbaiki sikap dan perilaku anggota (Hayes, 2019). Penerapan sistem Tanggung Renteng membentuk sikap dan perilaku anggota, membentuk kebersamaan, kejujuran, keterbukaan, disiplin, dan tanggung jawab (Regina et al., 2021). Menurut Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Keluarga, pengertian ketahanan dan kesejahteraan keluarga meliputi: (1) Landasan Keutuhan dan Keutuhan Keluarga; (2) Ketahanan

Fisik; (3) Ketahanan Ekonomi; (4) Ketahanan Sosial Psikologis; dan (5) Ketahanan Sosial Budaya. Dengan demikian, kelima elemen tersebut di atas akan dimasukkan ke dalam lima dimensi—yang disebut demikian—yang digunakan untuk mengukur ketahanan keluarga. Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, derajat ketahanan keluarga dievaluasi untuk setiap dimensi melalui sejumlah indikator yang relevan secara fungsional, yang kemudian dijabarkan ke dalam variabel lain. Setelah grafik singkat di bawah ini, akan disajikan lebih detail mengenai dimensi, faktor, dan indikator ketahanan keluarga yang digunakan (Susana, 2016).



Gambar 1. Dimensi dan Variabel Pengukur Tingkat Ketahanan Keluarga

SUMBER : Kementerian PPPA, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*

Fokus penulis dalam hal ini adalah ketahanan ekonomi, khususnya mengkaji dinamika keluarga, pendapatan, pendanaan pendidikan anak, dan stabilitas keuangan dalam keluarga. (Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013). Dari uraian yang telah disampaikan, untuk mengetahui lebih mendalam diperlukan penelitian lebih lanjut.

2. KAJIAN LITERATUR

Tanggung jawab bersama merupakan salah satu bentuk jaminan yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong antar anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pinjamannya. Beberapa studi empiris telah dilakukan dan memiliki korelasi positif baik bagi kelompok peminjam maupun lembaga keuangan (Suwangsih, 2020). Penelitian empiris lain terkait Tanggung Renteng menunjukkan bahwa terkadang penerapan Tanggung Renteng tidak berbanding lurus dengan keberhasilan lembaga keuangan dalam mengelola dana (Afriansyah et al., 2022).

Ketika membahas *Commanditaire Venootschap (CV)*, istilah “Tanggung Renteng” (*hoofdelijkheid*) pertama kali digunakan dalam tradisi perdagangan dan kemudian dikodifikasikan dalam Hukum Dagang (*Wet Boek van Koophandel*) (HIGASHI et al., 2017). Dasar transparansi dan rasa saling percaya, Tanggung Renteng merupakan bentuk tanggung jawab bersama antar

anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi (Acheson, 2009). Semua anggota kelompok akan bertanggung jawab atas akibatnya jika salah satu dari mereka tidak normal atau tidak sehat (Mardiyah & Ryandono, 2020)

Dalam perkembangannya, sistem Tanggung Renteng ini terus mengalami perbaikan, tidak hanya berupa komitmen, namun juga adanya berbagai jenis simpanan seperti simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela (Spencer & Komro, 2017). Berbagai jenis simpanan tersebut dapat digunakan oleh UPK ketika ada anggota kelompok yang menunggak, sehingga dalam prosesnya pertanggungjaban tidak jatuh pada seluruh anggota kelompok melainkan pada yang menunggak itu sendiri dan dapat ditutupi dari tabungan yang dimilikinya (Krauss et al., 2020). The rules regarding savings are usually regulated in the group's Articles of Association (AD-ART), which in one of the articles states the obligation to have savings when becoming a member of the group (Setiawan & Faruq, 2019).

Kata resiliensi berasal dari bahasa Latin “resilire” yang berarti “melompat mundur” mengacu pada kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dengan cepat dari konsekuensi masalah yang dihadapinya (Svyrydenko & Tulowiecki, 2018). Ketahanan ekonomi keluarga merupakan suatu kondisi dan kemampuan yang memungkinkan keluarga untuk pulih dan pulih dari sumber permasalahan dalam aspek ekonomi (Briguglio, 2006). Ketahanan ekonomi mencakup peningkatan pendapatan keluarga dan memungkinkan keluarga menghadapi kemerosotan ekonomi. Ketahanan ekonomi keluarga, sebagaimana didefinisikan oleh BIS (2016), adalah kapasitas sebuah keluarga untuk menahan guncangan dan permasalahan ekonomi yang negatif serta memitigasi dampak ketidakseimbangan keuangan.(Center for Local Economis Strategis (CLES)., 2016).

Ketahanan keluarga diartikan sebagai suatu kondisi yang mampu beradaptasi dan mengatasi tekanan demi tekanan pada masa kini dan masa depan (Sugarmanto et al., 2010). Keluarga tangguh akan menghadapi permasalahan secara positif melalui berbagai cara yang disesuaikan dengan konteks permasalahan, tingkat kesulitan, dan berbagai pertimbangan terkait kepentingan seluruh anggota keluarga (Stellmacher & Kelboro, 2019). Ketahanan keluarga merupakan sebuah konsep holistik yang memadukan alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan sumber daya, strategi coping dan “penilaian” (Mondal et al., 2009). Ketahanan keluarga merupakan suatu proses dinamis bagi keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya yang datang dari luar dan dalam keluarga (Suza et al., 2021). Konsep ketahanan keluarga Indonesia menjelaskan tentang ketahanan keluarga (Houseknecht & Aal, 1998), menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola permasalahan yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sartono & Respati, 2021).

Dengan menggunakan pendekatan sistem, hal ini diukur dan mempertimbangkan proses (manajemen keluarga, kesalahan keluarga, mekanisme penanggulangan), serta komponen masukan (sumber daya fisik dan non-fisik), output (pemuasan kebutuhan psikologis dan fisik) (Smith & Smith, 2015). Ketahanan keluarga merupakan gagasan komprehensif yang mengintegrasikan proses berpikir suatu sistem, dimulai dari tingkat ketahanan sumber daya, mekanisme coping, dan “rasial”. Oleh karena itu, ketahanan keluarga dipahami sebagai proses penyesuaian diri yang sehat secara psikologis terhadap kesulitan. Menurut Petterson (2002),

keluarga yang tangguh adalah keluarga yang mengintegrasikan unsur-unsur protektif dan reparatif seperti optimisme, spiritualitas, harmoni, fleksibilitas, komunikasi, pengelolaan uang, waktu senggang, rutinitas dan ritual, serta dukungan sosial. Hal ini semakin mendukung gagasan bahwa ketahanan keluarga merupakan sebuah kontinum, artinya tingkat ketahanan suatu keluarga dapat berbeda-beda tergantung pada keadaan (Bank for International Settlements, 2016).

Dimensi ketahanan perekonomian digambarkan melalui 4 (empat) variabel dan 7 (tujuh) indikator, yaitu pertama, Variabel Tempat Tinggal Keluarga diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Kepemilikan Rumah. Kepemilikan rumah akan dilihat dari status kepemilikan bangunan tempat tinggal tersebut. Agar berpotensi mampu mewujudkan keluarga dengan tingkat ketahanan keluarga yang lebih tinggi, keluarga yang telah memiliki rumah sendiri menandakan telah terpenuhinya salah satu kebutuhan dasarnya. Dengan kata lain, keluarga yang tinggal di rumah sendiri diperkirakan memiliki tingkat keamanan finansial yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal di properti sewaan (Brucker & Houtenville, 2014).

Kedua, variabel Pendapatan Keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Pendapatan Per Kapita Keluarga, dan Kecukupan Pendapatan Keluarga. Pentingnya pendapatan keluarga dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga terutama difokuskan pada seberapa memadai pendapatan tersebut. dimana penilaian obyektif dan subyektif mengenai kecukupan pendapatan sebagai salah satu komponen ketahanan ekonomi keluarga digabungkan. Premis penilaian pendapatan obyektif adalah bahwa keluarga dengan pendapatan per kapita lebih tinggi akan lebih aman secara finansial. Sebaliknya, penilaian pendapatan subyektif memberikan bobot yang lebih besar pada seberapa puas keluarga tersebut dengan uang yang mereka hasilkan. Hal ini berarti bahwa keluarga diharapkan memiliki keamanan finansial yang lebih besar jika mereka yakin bahwa pendapatan mereka cukup atau bahkan lebih besar dari apa yang mereka perlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Nam et al., 2016).

Ketiga, kemampuan pembiayaan pendidikan anak dan keberlangsungan pendidikan anak merupakan dua (dua) indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pembiayaan pendidikan anak. Ketahanan keluarga yang kuat dapat dihasilkan dari keluarga yang mampu membiayai pendidikan anak-anaknya sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun. Keluarga-keluarga ini dianggap lebih tangguh secara ekonomi. Sebaliknya, adanya anggota keluarga yang putus sekolah lebih awal merupakan pertanda adanya kesulitan keuangan dalam keluarga; Meskipun kesulitan keuangan tidak selalu menjadi alasan untuk meninggalkan sekolah lebih awal, hal ini tetap berdampak pada rendahnya ketahanan keluarga. Dengan kata lain, keluarga yang tidak memiliki anak putus sekolah mempunyai kapasitas untuk menunjukkan tingkat ketahanan keluarga yang tinggi. Keluarga dengan kondisi keuangan yang kuat harus dapat memastikan bahwa semua anggotanya menerima pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang bolos sekolah (Hančinský et al., 2020).

Keempat, variabel Ketahanan Finansial Keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Tabungan Keluarga dan Jaminan Kesehatan Keluarga. Ketahanan ekonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa depan. Sehingga kepemilikan asuransi terhadap risiko yang mungkin dihadapi di kemudian hari menjadi salah satu variabel yang membangun ketahanan ekonomi keluarga. Salah satu jaminan tersebut

adalah memiliki tabungan keluarga, dalam bentuk apapun. Selain itu, asuransi terhadap risiko juga dapat berupa asuransi kesehatan keluarga. Dimana suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan ekonomi keluarga jika memiliki asuransi keluarga, yang dalam hal ini digambarkan melalui kepemilikan BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, Askes/ASAbri/Jamsostek, Jamkesmas/PBI, Jamkesda, asuransi swasta, serta asuransi kesehatan. asuransi dari perusahaan/kantor (Venner, 1997).

3. METODO PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Dunn, 2009; Fauzi & Fauzan, 2022), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2018). Data penelitian dikumpulkan dari sumber primer berupa wawancara mendalam terhadap informan secara tidak terstruktur. Informan penelitian yang diwawancarai diambil secara *Snowball Sampling* (Sugiyono, 2018). Selain itu juga mengumpulkan data sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan lainnya sesuai dengan tema penelitian ini (Agustiari & Fauzi, 2021; Arzam et al, 2023). Dalam penelitian ini sebelum melakukan uji analisis data terlebih dahulu dilakukan uji keabsahan data. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi sehingga akan terlihat benang merah dan/atau hasil yang lebih baik (Fauzi & Kurniawan, 2023). Setelah dilakukan pengujian keabsahan data tersebut, selanjutnya dilakukan tahap analisis data dengan menggunakan model Miles dan Huberman meliputi Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Sugiyono, 2018).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketahanan keluarga juga mengacu pada kemampuan materi keluarga untuk hidup mandiri dan tumbuh sebagai satu kesatuan, sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya (UU Nomor 52 Tahun 2009). Ketahanan keluarga adalah kemampuan sistem keluarga untuk beradaptasi dan menstabilkan diri setelah diganggu oleh tantangan dan permasalahan (Axinn & Levin, 1979). Ketahanan keluarga juga dapat dipahami sebagai mekanisme yang digunakan suatu keluarga untuk mempertahankan diri terhadap anggota keluarga lainnya ketika menghadapi tantangan atau permasalahan (Swasono Sri-Edi, 2015). Ketahanan keluarga merupakan proses regulasi yang mengembalikan keseimbangan sistem dinamis akibat gangguan dan tantangan yang dihadapi keluarga (Setiawan & Faruq, 2019).

Kemampuan materi keluarga ini dapat diartikan sebagai kemampuan mereka dalam mengatasi kesulitan keuangan dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki (Fauzi & Kurniawan, 2023; Hulwati, 2022). Oleh karena itu, akan dibahas beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat ketahanan ekonomi suatu keluarga terkait dengan ketahanan ekonomi (Setiawan & Faruq, 2019). Dimensi tersebut dibangun dari empat variabel, antara lain:

SPP Tempat Tinggal Keluarga Anggota

Dari permasalahan pokok mengenai rumah (pengurus) anggota SPP, penulis memperkuat data yang ada melalui ketua kelompok di masing-masing Nagari, sehingga hasil wawancara yang penulis temukan dengan ketua kelompok adalah: Bahwa anggota kelompok membuka usaha dari pinjaman yang diberikan oleh UPK SPP. Berdasarkan data yang ada, dari 300 lebih anggota kelompok tersebut, terdapat 100 anggota yang sudah mampu memperbaiki rumah tempat tinggalnya. Sedangkan anggotanya menggunakan modal pinjaman yang disediakan partai. UPK

dengan membuka usaha-usaha kecil seperti membuka usaha konter (jualan pulsa), usaha sarapan pagi dan juga yang menggunakan modal perikanan (tambak udang, tambak lele dan jaring laut). Dengan upaya ini, anggota kelompok dapat memperbaiki rumah tempat tinggalnya (Wawancara, Ketua Kelompok SPP).

Pada variabel mengenai tempat tinggal keluarga anggota kelompok, penulis menemukan bahwa: anggota kelompok berhasil memperbaiki (merehabilitasi) rumahnya menjadi lebih baik atau layak huni. Sebaliknya, ada pula anggota yang mampu membangun rumah bagus secara bertahap. Artinya meskipun sebagian besar anggota hanya mampu merehabilitasi tempat tinggalnya, namun berarti SPP berhasil memberikan pertumbuhan keluarga dari segi Pengurus (tempat tinggal keluarga). (Center for Local Economis Strategis (CLES)., 2016) Salah satu faktor yang menumbuhkan ketahanan ekonomi adalah tempat tinggal anggota keluarga yang ditunjukkan dengan status kepemilikan suatu rumah. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur ketahanan ekonomi suatu rumah tangga karena untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya dan berpotensi menciptakan unit keluarga yang lebih berketahanan, rumah tangga yang memiliki tempat tinggal telah mampu memenuhinya (Harris & Parisi, 2008).

Kepemilikan hunian akan diukur dengan indikator status kepemilikan bangunan hunian. Diperkirakan bahwa rumah tangga yang tinggal di bangunan milik pribadi akan menikmati stabilitas keuangan yang lebih baik dibandingkan rumah tangga yang tidak memiliki bangunan milik pribadi. Rumah tangga anggota SPP sebagian besar telah menempati bangunan tempat tinggalnya sendiri (95,05%), sedangkan sisanya menempati bangunan tempat tinggal dengan membayar kontrak atau sewa, kost (bebas sewa), dan lain-lain (05,54%). Apabila sebuah keluarga dapat berkontribusi secara maksimal untuk mencapai potensi maksimalnya, maka keluarga tersebut akan memiliki resiliensi. Kecukupan dan kesinambungan akses terhadap sumber daya dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mendasar, seperti memiliki perumahan yang layak, disebut sebagai ketahanan keluarga. Pada tahun 2016, (Cahyaningtiyas dkk). Ketahanan keluarga juga mengacu pada kapasitas keluarga dalam mengelola permasalahan dan sumber daya secara efektif guna mencapai kesejahteraan. Kapasitas keluarga untuk bertahan menghadapi kesulitan dan mempertahankan kemandiriannya dikenal sebagai ketahanan keluarga (Sunarti, 2001).

Tabel 1. Hasil Wawancara

No.	Nama Inisial	Posisi	Nama Kelompok	Tempat Tinggal sebelum menjadi anggota SPP	Kondisi Tempat Tinggal setelah menjadi anggota SPP
1	Y	anggota	Nyiur Melambai Pelangai (Riak Gelombang)	Dinding rumah permanen, lantai semen, kamar mandi/sumur luar rumah	Dinding rumah permanen, lantai keramik, kamar mandi, toilet ada di dalam rumah
2	K	anggota	Pasia Pelangai (Kato saiyo)	Rumah berdinding papan somel, lantai semen kasar, masih menggunakan sumur	Rumah berdinding permanen, kamar mandi dan toilet ada di dalam rumah
3	EN	anggota	Sungai	Rumah Semi Permanen,	Rumah berdinding GRC,

			Tunu Utara (Talang sepakat)	Kamar mandi/sumur terpisah di luar rumah, lantai semen	berlantai semen, sumur sudah diinjeksi
--	--	--	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Pendapatan Keluarga Anggota SPP

Kecukupan pendapatan sebagai salah satu komponen stabilitas keuangan keluarga akan diukur dengan menggunakan indikator objektif dan indikator subjektif. Pertama, indikator obyektif akan melihat kecukupan pendapatan dengan pendapatan per kapita rumah tangga (Axinn & Levin, 1979). Rumah tangga dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dianggap lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Sebaliknya, indikator subjektif akan menilai kecukupan rumah tangga dengan mempertimbangkan sejauh mana pendapatan rumah tangga dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Keluarga yang percaya bahwa pendapatan mereka dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan hidup sehari-hari juga lebih tahan terhadap krisis ekonomi.

Pembahasan ini merupakan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan penelitian, kemudian diulas kembali dengan bahasa yang mudah dipahami. Hasil wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Keluarga Per Kapita

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan KPPPA bersama LPPM-IPB tentang ketahanan keluarga, batas minimal pendapatan per kapita per bulan adalah Rp 250.000,00. Artinya, rumah tangga yang pendapatan per kapita per bulannya lebih dari Rp250.000,00 lebih berketahanan ekonomi dibandingkan rumah tangga yang pendapatan per kapita per bulannya kurang dari Rp250.000,00. Pada subbab ini pendapatan per kapita rumah tangga per bulan diprosikan dengan pengeluaran per kapita rumah tangga per bulan yang terbagi dalam empat kelompok, yaitu Kelompok I yaitu rumah tangga yang pengeluaran per kapita per bulannya kurang dari Rp 250.000,00; Golongan II Rp250.000,00 s/d Rp499.999,00; Kelompok III Rp. 500.000,00 hingga Rp. 749.999,00; dan Golongan IV lebih dari Rp750.000,00. Informasi pengeluaran per kapita per bulan diperoleh dari hasil Modul Konsumsi Susenas yang meliputi pengeluaran makanan dan non makanan.

Penerapan sistem Tanggung Renteng dalam menaikkan biaya pendidikan memberikan dampak yang luar biasa. Karena sistem Tanggung Renteng sudah mendarah daging dan diterapkan sejak awal. Hakikat sistem Tanggung Renteng adalah upaya peningkatan kualitas manusia melalui interaksi antar manusia. Dengan memanfaatkannya atas dasar keterbukaan, rasa saling percaya dan berfungsi sebagai sarana pendewasaan manusia. Hal ini terlihat dari jumlah anggotanya. yang semakin meningkat setiap tahunnya, sebagai berikut: (Interview, SPP Data 2023)

Tabel 2. Pertumbuhan/Tahunan Anggota Kelompok

Years	Pasia Pelangai	Nyiur Melambai Pelangai	Sungai Tunu Utara
2021	+ 7 %	+ 10%	+ 2%
2022	+ 10 %	+ 15 %	+ 4 %
2023	+ 12 %	+ 17 %	+ 5 %

Di antara ketiga ketua kelompok yang penulis wawancarai, ditemukan satu kelompok yang anggotanya tidak banyak berkembang, dari segi pinjaman dan juga nilainya kurang, yaitu di Nagari Sungai Tunu Utara. Karena sering menunggak pembayaran, maka tidak diperkenankan menambah anggota kelompok. Analisis penulis menemukan dari pertumbuhan kelompok yang disampaikan oleh masing-masing pengurus bahwa SPP memberikan jaminan untuk masa depan. Diantaranya adalah jaminan pendapatan keluarga anggota. Jika pertumbuhan anggota semakin tinggi berarti SPP memberikan perubahan ekonomi kepada keluarga anggota yang ikut dalam kelompok.

Kecukupan Pendapatan Keluarga

Berbeda dengan bab sebelumnya, bab ini membahas kecukupan pendapatan rumah tangga berdasarkan penilaian subyektif kepala rumah tangga atau pasangan mengenai besarnya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini penting karena ketahanan keluarga yang mencakup kesejahteraan keluarga dapat dinilai secara obyektif dan subyektif. Penilaian pendapatan subjektif memberikan bobot yang lebih besar pada tingkat kepuasan rumah tangga terhadap uang yang mereka peroleh (Fauzi et al, 2021; Hulwati, 2022). Diasumsikan bahwa evaluasi subjektif dan keadaan keuangan objektif keluarga akan mempunyai hubungan satu arah. Hal ini menyiratkan bahwa tingkat kepuasan rumah tangga terhadap situasi keuangannya meningkat seiring dengan tingkat pendapatan. Analisis selanjutnya mengungkapkan bahwa besar kecilnya pendapatan rumah tangga berdampak pada penentuan apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Proporsi rumah tangga yang merasa pendapatan rumah tangganya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari meningkat seiring dengan menurunnya pendapatan kelompok rumah tangga.

Seperti wawancara yang penulis lakukan terhadap masing-masing ketua kelompok, penulis memperoleh penilaian bahwa diantara ketiga ketua kelompok yang penulis wawancarai adalah anggota yang mengikuti SPP sudah mempunyai penghasilan yang cukup di keluarganya masing-masing. Hal ini terlihat dari pendapatan yang diperoleh anggota kelompok yang mengalami kemajuan dalam usahanya. Penulis menemukan dari pertumbuhan kelompok yang disampaikan masing-masing pengurus bahwa SPP memberikan jaminan masa depan. Diantaranya adalah jaminan kecukupan anggota keluarga. Jika pertumbuhan anggota semakin tinggi berarti SPP memberikan kecukupan ekonomi bagi keluarga anggota yang ikut dalam kelompok.

Pembiayaan Pendidikan Anak Anggota SPP

Terdapat wawancara yang penulis lakukan dengan anggota kelompok. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap beberapa anggota kelompok, ditemukan bahwa jawaban yang diberikan dari berbagai anggota kelompok adalah sama. Hasil wawancara adalah:

“Sebelum bergabung dengan SPP, anggota kelompok kesulitan untuk menanggung biaya pendidikan anaknya, dengan membuka usaha yang disediakan oleh SPP biaya pendidikan anaknya mulai terbantu” (Interview, November 2023).

“Dulu saya sering meminjam ke tetangga untuk biaya sekolah anak saya, kadang saya meminjam ke koperasi, namun bukannya mendapat bantuan lebih, saya justru semakin kesulitan membayar cicilan

yang telah ditetapkan karena bunganya sangat tinggi. Setelah bergabung dengan SPP, perekonomian mulai terbantu dengan memulai usaha yang diawasi oleh pengurus SPP. Sebaliknya bunganya tidak terlalu tinggi, anggota diberikan pinjaman yang mereka perlukan sesuai dengan usaha yang mereka miliki” (Interview, November 2023).

“Begitu pula dengan kelompok Sungai Tunu Utara, pembiayaan sekolah anak tidak terlalu sulit untuk dipikirkan, karena mereka terbantu dengan bergabung menjadi anggota SPP.” (Interview, November 2023).

Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting saat ini. Status pendidikan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu cara untuk menggambarkan kondisi ketahanan ekonomi rumah tangga karena dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk mengetahui kecukupan pendapatan rumah tangga secara objektif. Pendidikan anak sebagai variabel pembentuk dimensi ketahanan ekonomi untuk mengukur ketahanan keluarga terdiri dari dua indikator, yaitu (1) kemampuan membiayai pendidikan anak, dan (2) keberlangsungan pendidikan anak.

Kemampuan Mendanai Pendidikan Anak

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menjamin terselenggaranya pendidikan minimal wajib pada jenjang pendidikan dasar (sederajat SD dan SMP) tanpa memungut biaya (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN). Namun kebijakan gratis biaya sekolah hanya berlaku bagi siswa yang bersekolah di SD atau SMP negeri, dan belum berlaku secara nasional. Di sekolah tertentu masih terdapat biaya yang besarnya bervariasi dan ditentukan oleh komite sekolah. Selain itu, sekolah negeri belum mampu menampung seluruh siswa usia sekolah, sehingga hanya siswa yang mempunyai nilai bagus saja yang mampu bersaing untuk diterima di sekolah negeri. Hal ini mengakibatkan sebagian siswa harus melanjutkan ke sekolah swasta yang memerlukan biaya lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri (Tamborini & Cupito, 2012).

Namun setelah anggota SPP bergabung menjadi anggota kelompok, tidak lagi terlalu sulit memikirkan biaya sekolah anaknya, dengan usaha yang dijalankan oleh anggota mereka terbantu dengan hasil yang diperoleh dari usahanya

Keberlanjutan Pendidikan Anak

Berlangsungnya pendidikan anak akan tergambar dari besarnya persentase rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga yang putus sekolah. Putus sekolah merupakan suatu keadaan dimana seseorang pada usia sekolah (7-18 tahun) tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan yang sedang dijalannya. Dalam hal ini, mereka yang telah menyelesaikan sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu namun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak termasuk dalam kelompok putus sekolah. Ketahanan finansial rumah tangga yang kuat harus mampu menjamin seluruh anggota rumah tangga mendapat pendidikan serta tidak ada anak yang putus sekolah.

“Sejak adanya SPP ini perekonomian anggota kelompok mulai terbantu dan biaya sekolah anak anggota kelompok tidak lagi tertunggak serta pendidikan anak anggota kelompok sudah sampai perguruan tinggi” (Interview Ketua Kelompok SPP, November 2023).

Untuk memperjelas pendidikan anak anggota kelompok SPP, penulis membuat tabel yang berisi data pendidikan anak anggota kelompok:

Tabel 3. Pendidikan Anak Anggota Kelompok

Education Level	Pasia Pelangai	Nyiur Melambai Pelangai	Sungai Tunu Utara
SD	38	61	18
SMP/MTS	35	36	11
SMA	24	17	7
College	12	18	3

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada masing-masing kelompok penulis, ditemukan bahwa: SPP memberikan dampak yang baik bagi anggotanya. Di antara ketiga kelompok tersebut, pendidikan anak-anak anggota kelompok memberikan kepastian dari upaya yang dilakukan para anggotanya. Terlihat juga dari data yang diperoleh bahwa anggota kelompok mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan anak anggotanya. Anggota kelompok mampu membiayai pendidikan anaknya hingga universitas.

Jaminan Keuangan Keluarga Anggota SPP

Pembahasan ini merupakan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan penelitian, kemudian diulas kembali dengan bahasa yang mudah dipahami. Hasil wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut: Selain kecukupan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ketahanan ekonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa depan. Sehingga kepemilikan asuransi terhadap risiko yang mungkin dihadapi di kemudian hari menjadi salah satu variabel yang membangun ketahanan ekonomi keluarga. Jaminan terhadap risiko tersebut diukur dengan variabel jaminan finansial yang terdiri dari dua indikator yaitu tabungan keluarga dan asuransi keluarga.

Tabungan Keluarga

Penilaian suatu kelompok terhadap nilai dan volume produksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu berdasarkan berbagai indikator—seperti peningkatan pendapatan anggota, pendapatan per kapita, lapangan kerja dibandingkan pengangguran, dan penurunan tingkat kemiskinan—dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi anggota. Cara lain untuk berpikir tentang pertumbuhan ekonomi adalah sebagai proses perbaikan keadaan ekonomi suatu kelompok yang berkelanjutan. Ketika lebih banyak barang dan jasa diproduksi sebagai akibat langsung dari aktivitas ekonomi warganya, maka perekonomian negara tersebut dianggap berkembang. Mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing anggota memungkinkan manajemen membuat rencana ke depan untuk pertumbuhan di masa depan (Apridar, 2009).

Rumah tangga yang memiliki tabungan berpotensi memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik (Fauzi et al, 2021; Hulwati, 2022). Informasi terkait tabungan rumah tangga. Informasi yang dikumpulkan mencakup akses keuangan rumah tangga, termasuk kepemilikan tabungan dan jenis

tabungan. Namun dalam pembahasan kali ini tabungan yang dimiliki oleh rumah tangga dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu produk bank (tabungan biasa/deposito/giro), produk non bank (koperasi/pos), dan lain-lain (simpanan di celengan/dll)..

“Rata-rata anggota kelompok mempunyai tabungan dalam bentuk tabungan biasa di bank, kemudian sebaliknya anggota kelompok juga mempunyai tabungan dalam bentuk celengan di rumah. Karena pendapatan anggota kelompok tidak begitu tinggi, maka anggota kelompok hanya mempunyai tabungan biasa” (Interview, November 2023).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada pengurus SPP, dimana Pengurus SPP merupakan pengurus inti yang berada diatas Ketua Kelompok. Dikatakannya, anggota kelompok yang tergabung dalam SPP hanya mempunyai simpanan biasa yaitu simpanan di bank dan juga simpanan dalam bentuk celengan. Beliau juga memberikan data base anggota kelompok yang memiliki berbagai jenis tabungan yaitu:

Tabel 4. Jenis Tabungan Anggota Kelompok SPP

No	Nama Saving	Pasia Pelangai	Nyiur Melambai Pelangai	Sungai Tunu Utara
1	Ordinary Savings at the Bank	85 %	95 %	70 %
2	Deposit	0%	0%	0%
3	Giro	0%	0%	0%
4	Koperasi	20 %	50 %	10 %
5	Pos	0%	0%	0%
6	Home Piggy Bank Savings	95 %	98 %	75 %

Sumber: Data UPK Kecamatan Ranah Pesisir

Pada penjelasan di atas, penulis menemukan bahwa anggota kelompok SPP rata-rata sudah memiliki tabungan di bank, namun hanya menabung untuk kebutuhan sehari-hari dan transaksi. Namun bisa dikatakan seluruh anggota sudah mempunyai tabungan pribadi berupa celengan di rumah. Artinya anggota kelompok mempunyai jaminan tabungan di masa depan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Asuransi Kesehatan Keluarga

Kepemilikan berbagai asuransi, termasuk asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, merupakan salah satu ukuran stabilitas keuangan. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebenarnya telah mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan menawarkan berbagai program jaminan sosial di bidang kesehatan, pemerintah mulai melaksanakan upaya penciptaan sistem jaminan sosial.

Sementara melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), pemerintah telah memberikan jaminan manfaat kepada masyarakat tidak mampu dan kurang mampu. Namun masih terdapat sejumlah permasalahan, seperti kualitas layanan yang tidak merata tergantung pada jenis asuransi kesehatan yang dimiliki sebuah keluarga, sehingga sebagian keluarga Indonesia enggan mendaftar menjadi peserta BPJS secara mandiri.

“Rata-rata anggota kelompok SPP sudah memiliki jaminan kesehatan berupa Jamkesmas yang diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin atau kurang mampu, namun ada juga yang belum mengurusnya sama sekali karena tidak merasakannya. diperlukan. Lalu disisi lain ada juga anggota kelompok yang memiliki asuransi kesehatan mandiri seperti BPJS, namun jumlahnya tidak seberapa karena harus membayar setiap bulannya” (Interview, November 2023).

“Di antara anggota kelompok SPP secara keseluruhan mempunyai jaminan kesehatan berupa Jamkesmas dan juga BPJS. dimana Jamkesmas diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin atau tidak mampu, namun ada juga yang belum mengurusnya sama sekali karena merasa tidak perlu.” (Interview, November 2023).

“Rata-rata anggota Nagari Sungai Tunu Utara hanya memiliki kartu jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah secara gratis kepada masyarakat miskin atau kurang mampu. Sedangkan untuk BPJS, di Nagari hanya sedikit sekali anggota yang mempunyai jaminan kesehatan mandiri, bisa dibitung dengan jari. Karena keterbatasan ekonomi dan juga tagihan yang harus dibayar setiap bulannya” (Interview, November 2023) .

Kemudian penulis juga memperkuat data yang diperoleh dari UPK Kecamatan Ranah Pesisir yaitu: anggota kelompok SPP sudah memiliki jaminan kesehatan sendiri, namun sebagian besar anggota kelompok hanya memiliki jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah untuk masyarakat miskin atau tidak mampu. Hanya sedikit anggota yang memiliki jaminan kesehatan mandiri (BPJS). Artinya, untuk jaminan kesehatan bagi anggota kelompok SPP sudah terpenuhi.

Diantara permasalahan yang penulis bahas, penulis menemukan hasil yang berkaitan dengan variabel pertanyaan yaitu:

Perkembangan kelompok disampaikan oleh masing-masing pengurus bahwa SPP memberikan jaminan untuk masa depan. Diantaranya adalah jaminan pendapatan keluarga anggota. Jika pertumbuhan anggota semakin tinggi berarti SPP memberikan perubahan ekonomi kepada keluarga anggota yang ikut dalam kelompok. Kemudian mengenai tempat tinggal (rumah) keluarga anggota kelompok, penulis menemukan bahwa: anggota kelompok berhasil memperbaiki (merehabilitasi) rumah tersebut dengan lebih baik. Sebaliknya, ada pula anggota yang mampu membangun rumah bagus secara bertahap. Artinya meskipun sebagian besar anggota hanya mampu merehabilitasi tempat tinggalnya, namun berarti SPP berhasil memberikan pertumbuhan keluarga dari segi Pengurus (tempat tinggal keluarga). SPP memberikan dampak yang baik bagi anggotanya. Di antara ketiga kelompok tersebut, pendidikan anak-anak anggota kelompok memberikan kepastian dari upaya yang dilakukan para anggotanya. Terlihat juga dari data yang diperoleh bahwa anggota kelompok mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan anak anggotanya. Anggota kelompok mampu membiayai pendidikan anaknya hingga universitas.

Ketahanan hukum dan integritas keluarga, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, dan ketahanan sosial budaya merupakan contoh komponen non fisik dan fisik dari pola ketahanan keluarga. Dengan membina ketahanan keluarga maka pola ketahanan keluarga dapat maksimal. Membangun ketahanan keluarga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membangun ketahanan non fisik dan membangun ketahanan fisik. Meningkatkan ketahanan fisik melalui bantuan, bantuan permodalan, askeskin, dan raskin bagi keluarga kaya dan miskin.

Meningkatkan ketahanan non-fisik, misalnya dengan meningkatkan standar perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, dan pengetahuan tentang bagaimana keluarga harus beroperasi (Kholimin & Wijaya, 2020). Pola ketahanan keluarga yang mencakup ketahanan non fisik diikuti dalam membangun ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga yang kuat dan sehat dapat menjamin keluarga tetap bertahan dan mampu beradaptasi terhadap berbagai tantangan dan hambatan. Kemampuan suatu keluarga untuk menjamin kelangsungan hidupnya, mempertahankan ketahanannya, dan mencapai kesejahteraan tercermin dari pola ketahanan keluarga. Kemampuan suatu keluarga dalam mengelola sumber dayanya dan melewati rintangan dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik dan psikososialnya dikenal dengan istilah kesinambungan keluarga atau ketahanan keluarga (Rukmana, 2021).

5. KESIMPULAN

Implikasi penerapan Tanggung Renteng pada kelompok simpan pinjam perempuan memberikan jaminan bagi tumbuh kembang kelompok SPP untuk masa depan dan ketahanan ekonomi keluarga. Diantaranya agar tempat tinggal anggota kelompok setelah menjadi anggota kelompok SPP dapat memperbaiki (merehabilitasi) tempat tinggalnya dari yang sebelumnya tidak mempunyai WC, tembok rumah papan, lantai semen, menjadi lebih baik. Jaminan pendapatan keluarga anggota. Apabila pertumbuhan anggota semakin tinggi berarti SPP memberikan perubahan ekonomi kepada keluarga anggota yang ikut serta dalam kelompok dan dapat meningkatkan pendapatan anggota dari hasil usaha yang dijalankan. Kemampuan membiayai pendidikan anak anggota kelompok SPP sudah mampu membiayai pendidikan anak melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan sebagian anggota kelompok sudah mampu membiayai pendidikan anaknya sampai perguruan tinggi. Jaminan keuangan keluarga dari anggota SPP dalam hal ini tabungan keluarga bahwa sebagian anggota kelompok SPP telah mempunyai tabungan di bank. Kemudian jaminan kesehatan bagi seluruh anggota kelompok SPP pada umumnya sudah ada jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah bagi masyarakat kurang mampu, hanya sedikit anggota yang memilikinya. asuransi kesehatan mandiri (BPJS).

DAFTAR REFERENSI

- Acheson, A. (2009). *Family Economic Security*.
- Afriansyah, I., Kusumaningrum, R., & Rizal, M. (2022). Analisis Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT) Pola Tanggung Renteng di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baytul Ikhtiar Cabang Leuwisadeng. *SAHID BANKING JOURNAL*, 2(1), 141–151. <https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v2i01.74>
- Agustiari, A., & Fauzi, M. (2021). Pendistribusian Zakat Bentuk Pinjaman Dalam Mengatasi Pedagang Usaha Mikro Dari Pinjaman Ribawi Di BAZNAS Kabupaten Kerinci. *Jurnal*

- Iqtisaduna*, 7(2), 163-176. <https://doi.org/10.24252/IQTISADUNA.V7I2.25402>
- Arzam, A., Fauzi, M., Helfenta, H., & Musdizal, M. (2023). Cryptocurrency: Catatan Dari Tiga Perspektif. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 23(2), 96-112. <https://doi.org/10.32939/islamika.v23i2.2908>
- Axinn, J., & Levin, H. (1979). The family life cycle and economic security. *Social Work*, 24(6), 540–546. <https://doi.org/10.1093/sw/24.6.540>
- Bank for International Settlements. (2016). Bank for International Settlements (BIS). (2016). Economic Resilience: A Financial Perspective. Switzerland: BIS. *BIS*, 2016.
- Bloom, D. E., Mahal, A., Rosenberg, L., & Sevilla, J. (2010). Economic security arrangements in the context of population ageing in India. *International Social Security Review*, 63(3–4), 59–89. <https://doi.org/10.1111/j.1468-246X.2010.01370.x>
- Brucker, D. L., & Houtenville, A. J. (2014). Living on the edge: Assessing the economic impacts of potential disability benefit reductions for Social Security disability beneficiaries. *Journal of Vocational Rehabilitation*, 41(3), 209–223. <https://doi.org/10.3233/JVR-140714>
- Center for Local Economic Strategis (CLES). (2016). Center for Local Economic Strategis (CLES). (2016). Developing Local Economic Resilience: The Role of Local Enterprise Partnership (LEPs) . Manchester: CLES. *CLES*, 2016.
- Dunn, K. (2009). *Research Guides: Family Economic Security: Managing Information*.
- Eka Wahyu, Hellen Monica, N. D. T. D. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131-148. Retrieved from <https://E-Journal.Iainfmpapua.Ac.Id/Index.Php/Elmudhorib/Article/View/655>, 3(2). <https://doi.org/10.36276/mws.v6i1>
- Fauzi, M., & Kurniawan, M. (2023). Muslim Prosperous Family (MPF) Consumption in Koto Tuo Ujung Pasir Village: Is It Consistent with Islamic Consumption Behaviour?. *RISALAH IQTISADIAH: Journal of Sharia Economics*, 2(1), 35-46. <https://jurnal.steiarrisalah.ac.id/index.php/stei/article/view/29>
- Fauzi, M., & Fauzan, M. (2022). Pengaruh Store Atmosphere Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Depati VII Kopi Kota Sungai Penuh (Kerinci). *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 99-114. <http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib/article/view/443>
- Fauzi, M., Asa'ari, A., Arzam, A., Mursal, M., Zufriani, Z., Novia, A., & Syarif, D. (2021). Welfare Beneficiary Community BUMDes Karya Dermawan Dusun Dalam Village. *International Journal of Social Science and Business*, 5(3), 319. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v5i3.38621>
- Gonçalves, C. de B. Q., Schindwein, M. M., & Martinelli, G. do C. (2021). Agroforestry Systems: A Systematic Review Focusing on Traditional Indigenous Practices, Food and Nutrition Security, Economic Viability, and the Role of Women. *Sustainability*, 13(20), 11397. <https://doi.org/10.3390/su132011397>
- Hančinský, R., Mihálik, D., Mrkvová, M., Candresse, T., & Glasa, M. (2020). Plant Viruses Infecting Solanaceae Family Members in the Cultivated and Wild Environments: A Review. *Plants*, 9(5), 667. <https://doi.org/10.3390/plants9050667>
- Harris, D. A., & Parisi, D. (2008). Welfare and Family Economic Security: Toward a Place-Based Poverty Knowledge. *The Journal of Sociology & Social Welfare*, 35(3). <https://doi.org/10.15453/0191-5096.3358>
- Hayes, J. (2019). *Estimating the Contribution of Paid Leave to Family Economic Security*.

- Hesmawati Fifi. (2018). Fifi Hasmawati, Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal, Jurnal Pengembangan Masyarakat, Vol 5, No 5, Tahun 2018. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 5(5), 2018.
- HIGASHI, R. T., LEE, S. C., PEZZIA, C., QUIRK, L., LEONARD, T., & PRUITT, S. L. (2017). Family and Social Context Contributes to the Interplay of Economic Insecurity, Food Insecurity, and Health. *Annals of Anthropological Practice*, 41(2), 67–77. <https://doi.org/10.1111/napa.12114>
- Houseknecht, S. K., & Aal, M. A. (1998). Forins of Economic Security And The Family. *Journal of Comparative Family Studies*, 29(3), 429–449. <https://doi.org/10.3138/jcfs.29.3.429>
- Hulwati, H. (2022). Kesejahteraan ekonomi islam: bukti dari asyarakat penerima manfaat badan usaha milik desa (BUMDes) karya dermawan dusun dalam. *AN-NISBAH: JURNAL EKONOMI SYARLAH*, 9(02).375–409. <https://doi.org/10.21274/an.v9i2.5930>
- J, C. B., P, B. M. B., J, D. G., & A, G. J. M. O. L. (2015). Bio-economic modelling of the influence of family planning, land consolidation and soil erosion on farm production and food security in Rwanda. *Journal of Development and Agricultural Economics*, 7(6), 204–221. <https://doi.org/10.5897/JDAE2013.0481>
- Kholimin, K., & Wijaya, W. (2020). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Koperasi. *Jurnal JURISTIC*, 1(2), 197. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i02.1651>
- Krauss, S., Orth, U., & Robins, R. W. (2020). Family environment and self-esteem development: A longitudinal study from age 10 to 16. *Journal of Personality and Social Psychology*, 119(2), 457–478. <https://doi.org/10.1037/pspp0000263>
- Mardliyyah, A., & Ryandono, M. N. H. (2020). Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta'awun. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(2), 254. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp254-268>
- Mohamad, N. A. (2018). A Study on the Socio-Economic Roles of Waqf Ahli (Family Waqf) in Promoting Family Security and a Sustainable Family Economy. *IIUM Law Journal*, 26(1), 141. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v26i1.383>
- Mondal, N. I., Khan, A. R., Chakma, J., & Hossain, G. (2009). Family Structure, Economic Security and Educational Status of Rural Chakma in CHT of Bangladesh. *Journal of Social Sciences*, 19(3), 219–224. <https://doi.org/10.1080/09718923.2009.11892712>
- Nam, Y., Lee, Y., McMahan, S., & Sherraden, M. (2016). New Measures of Economic Security and Development: Savings Goals for Short- and Long-Term Economic Needs. *Journal of Consumer Affairs*, 50(3), 611–637. <https://doi.org/10.1111/joca.12078>
- Nesadurai, H. E. S. (2012). Conceptualising economic security in an era of globalisation: what does the East Asian experience reveal?: Helen E. S. Nesadurai. In *Globalisation and Economic Security in East Asia* (pp. 20–39). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203086155-11>
- Parthasarathy, P., Dailey, D. E., Young, M.-E. D., Lam, C., & Pies, C. (2014). Building Economic Security Today: Making the Health–Wealth Connection in Contra Costa County's Maternal and Child Health Programs. *Maternal and Child Health Journal*, 18(2), 396–404. <https://doi.org/10.1007/s10995-013-1309-7>
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruqq Media.
- Regina, T., Rochendi, T., & Pratama, A. N. (2021). Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha Umkm Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (Kgn). *KOMPLEKSITAS: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, ORGANISASI DAN BISNIS*,

- 10(2), 31–40. <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol10no2.136>
- Rukmana, T. S. M. (2021). Tanggung Jawab Pidana Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Atas Keterlibatan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 111/ Pid.B/2015/PN.Skh). *Jurnal Selat*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.31629/selat.v9i1.3799>
- Sartono, S., & Respati, H. (2021). Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Sistem Tanggung Renteng terhadap Perilaku Anggota yang berdampak kepada Keamanan Usaha di Koperasi Setia Budi Wanita Malang. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(1), 58–66. <https://doi.org/10.35130/jrimk.v5i1.118>
- Setiawan, R., & Faruq, U. Al. (2019). Sistem Informasi Koperasi Taburpuja Berbasis Tanggung Renteng. *Jurnal Sistem Informasi Dan Sains Teknologi*, 1(1). <https://doi.org/10.31326/sistek.v1i1.327>
- Skinner, C., Wight, V. R., Aratani, Y., Cooper, J., & Thampi, K. (2010). *English Language Proficiency, Family Economic Security, and Child Development*. <https://doi.org/10.7916/D8GT5W3N>
- Smith, E., & Smith, R. (2015). *Impacts of family planning on food security*.
- Spencer, R. A., & Komro, K. A. (2017). Family Economic Security Policies and Child and Family Health. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 20(1), 45–63. <https://doi.org/10.1007/s10567-017-0225-6>
- Stanczyk, A. B. (2019). Does Paid Family Leave Improve Household Economic Security Following a Birth? Evidence from California. *Social Service Review*, 93(2), 262–304. <https://doi.org/10.1086/703138>
- Statistik, B. P. (2018). *Badan Pusat*. Jakarta Pusat Dalam Angka 2018.
- Stellmacher, T., & Kelboro, G. (2019). Family Farms, Agricultural Productivity, and the Terrain of Food (In)security in Ethiopia. *Sustainability*, 11(18), 4981. <https://doi.org/10.3390/su11184981>
- Sugarman, S., O'Leary, A., Clements, A., & Lester, G. L. L. (2010). *Family Security Insurance: A New Foundation for Economic Security*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfa Beta.
- Sunarti, E., Gunawan, E., Widiyantoro, S., Marliyani, G. I., & Ida, R. (2021). Critical point on housing construction, resilience and family subjective welfare after disaster: Notes from the Lombok, Indonesia, earthquake sequence of July-August 2018. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 12(1), 922–938. <https://doi.org/10.1080/19475705.2021.1910576>
- Susana, Y. (2016). Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2016, Pembangunan Ketahanan Keluarga. *Buku*, 2016.
- Suwangsih, I. (2020). Membangun Helping Behavior Melalui Sistem Tanggung Renteng Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. *Media Mahardhika*, 18(3), 335–340. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v18i3.171>
- Suza, M. K., Hasan, S. S., Ghosh, M. K., Haque, M. E., & Turin, M. Z. (2021). Financial Security of Farmers through Homestead Vegetable Production in Barishal District, Bangladesh. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 1(4), 65–71. <https://doi.org/10.24018/ejsocial.2021.1.4.103>
- Svyrydenko, D., & Tulowiecki, D. (2018). Family Policy of the State as a Response to Social Security Threats. *Future Human Image*, 10, 92–102. <https://doi.org/10.29202/fhi/10/10>
- Swasono Sri-Edi. (2015). *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian (Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Press, 2015), 106. (p. 2106)*.

- Tamborini, C. R., & Cupito, E. (2012). Social insurance and children: The relationship between Social Security, economic well-being, and family context among child recipients. *Journal of Children and Poverty, 18*(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/10796126.2012.656552>
- Venner, S. H. (1997). *Realities and Choices: Helping States Enhance Family Economic Security*.
- Vesely, C. K., Goodman, R. D., Ewaida, M., & Kearney, K. B. (2015). A Better Life? Immigrant Mothers' Experiences Building Economic Security. *Journal of Family and Economic Issues, 36*(4), 514–530. <https://doi.org/10.1007/s10834-014-9422-3>